



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 810-815

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dampak Kebijakan Publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa

Dermawan N. K. Hulu^{1✉}, Syukur Kasieli Hulu², Amstrong Harefa³, Hendrikus O. N. Harefa⁴

Universitas Nias

Email: dermawannatakrismanhulu@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi, merupakan teknik untuk mengumpulkan data. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa : Pertama, dampak kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa adalah belum total terlaksana, karena masih banyak pemerintah yang menyalahgunakan bantuan atau ketergantungan jangka panjang pada bantuan sosial. Kedua, kendala kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada di Kecamatan Alasa sehingga menghambat pelaksanaan program. Ketiga, upaya mengatasi kendala kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa yaitu Pemerintahan Kecamatan bekerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten supaya kebijakan publik yang diberikan berjalan dengan lancar, selalu mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat dan terkini untuk memfasilitasi perencanaan dan evaluasi program yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Kemiskinan*

Abstract

This study aims to determine the impact of public policy in poverty alleviation programs in Alasa District. This study uses a descriptive approach with qualitative methods. Observation, interviews, and documentation are techniques for collecting data. This study was conducted in Alasa District, North Nias Regency. Based on the results of the study, it is concluded that: First, the impact of public policy in poverty alleviation programs in Alasa District has not been fully implemented, because many governments still misuse assistance or long-term dependence on social assistance. Second, the constraints of public policy in poverty alleviation programs in Alasa District are the limited budget and facilities in Alasa District, which hinder the implementation of the program. Third, efforts to overcome public policy constraints in poverty alleviation programs in Alasa District, namely the District Government in collaboration with the Regency Government so that the public policies provided run smoothly, always collecting and analyzing accurate and up-to-date data to facilitate more effective program planning and evaluation.

Keywords: *Public Policy, Poverty*

PENDAHULUAN

Menurut Chandler dan Plano (2017) menjelaskan kebijakan publik sebagai pendayagunaan taktis sumber daya untuk menemukan solusi akan masalah pemerintah atau publik. Menurutnya, kebijakan publik adalah cara negara mengintervensi untuk menjaga kebutuhan kelompok atau masyarakat yang tertinggal. Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik didefinisikan sebagai campur tangan dari pemerintah. Kemudian, untuk mengoptimalkan kebijakan publik berada pada sumber daya, yang merupakan pola dalam masyarakatnya. Dengan demikian, kebijakan publik akan menciptakan dampak yang bekerja sama dengan kebijakan lainnya.

Menurut Dye, (2017) keseluruhan dampak suatu kebijakan pada kehidupan nyata disebut kebijakan publik. *Output* kebijakan terdiri dari berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah yang diukur dengan standar tertentu. Angka yang diketahui memberikan informasi yang minim tentang hasil atau dampak kebijakan publik, karena dalam memutuskan hasil kebijakan publik harus memperhitungkan perubahan yang terjadi karena tindakan politik terhadap sistem politik atau lingkungan.

Menurut Suryawati, (2015) Kemiskinan terkait dengan tidak hanya kekurangan uang dan pendapatan, melainkan terikat hal seperti tingkat kesehatan dan edukasi yang rendah, ketidak-adilan dalam pemberlakuan hukum, ancaman kejahatan, dan ketidakberkemampuan untuk menentukan langkah hidup sendiri. Selain itu, kemiskinan dapat disebabkan oleh individu memiliki modal yang terbatas, fasilitas produksi, *marketing*,

peningkatan kuantitas dan kualitas produk, sanitasi, dan faktor-faktor eksternal seperti biaya, kenaikan harga bahan bakar, dan ketentuan lain, yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta semakin terbatasnya SDM untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Secara perdagangan, kemiskinan terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, minimnya penghasilan, dan laju ekonomi yang lambat.

Ketidaksanggupan masyarakat untuk terlepas dari lingkaran kemiskinan adalah penyebab kemiskinan. Oleh karena itu, pengembangan kualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah kecil sangat penting sebagai bagian dari berbagai strategi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang dipandang perlu untuk diberdayakan.

Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diatur dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang kemiskinan, yakni keadaan sosial ekonomi perseorangan atau kelompok orang yang kurang mampu memenuhi hak-hak mereka secara fundamental dalam menjalani dan memajukan kehidupan yang bermartabat, seperti hak untuk makanan, kebugaran jasmani, edukasi, karier, tempat tinggal, sumber daya alam, dan hak untuk turut serta dalam aktivitas sosial dan politik. Selain itu, kemiskinan terus menjadi "pekerjaan rumah" bagi pemerintah Indonesia. Sudah jelas bahwa masalah kemiskinan berdampak pada berbagai wilayah.

Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Alasa pada tanggal 06 Mei 2024, daerah tersebut masih terdapat kemiskinan karena kelalaian dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah di Kecamatan Alasa. Minimnya peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatnya tingkat pengangguran, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peneliti berminat untuk penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dampak, kendala, serta upaya mengatasi kendala kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa.

METODE PENELITIAN

Menurut Moleong 2013, Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berguna dalam mengetahui pemahaman yang lebih positif tentang masalah yang dirasakan subjek penelitian, seperti tingkah laku, pemikiran, impuls, aktivitas, secara keseluruhan dan secara elaborasi dengan memakai tata bahasa dalam ranah alam dan dengan menggunakan berbagai cara-cara yang ilmiah.

Pendekatan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yaitu pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut (Arikunto, 2019) "pendekatan deskriptif

adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian". Penelitian kualitatif berkaitan dengan opini, gagasan, argumen, atau harapan orang yang diteliti. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih lengkap untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan penelitian. Saling berhubungan, turut serta dan mengetahui cara hidup dari pandangan orang di dalamnya adalah jenis penelitian yang digunakan.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Selama penelitian, peneliti menggunakan alat merekam untuk mencari dan mengumpulkan data. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah beberapa metode pengumpulan data yang digunakan. Dalam kasus ini, alat pengumpulan data memakai fasilitas elektronik, seperti merekam suara dan mengambil gambar melalui ponsel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, maka peneliti mendapatkan hasil riset sebagai berikut :

Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa

Untuk mengatasi kemiskinan penduduk Indonesia, pemerintah membuat Program Penanggulangan Kemiskinan. Program ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, seperti Program Pengembangan Kecamatan, Kemitraan Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal, dan Program Pengembangan Prasarana Perdesaan, antara lain. sebagai program yang dirancang secara terpusat.

Kebijakan Publik yang diterapkan di Kecamatan Alasa yaitu, Kebijakan Pembangunan Infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas umum yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang pembangunan infrastruktur, dan UU No 30 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan jalan. Adanya bantuan sosial seperti bantuan sembako yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dan penyuluhan kesehatan seperti adanya imunisasi anak yang di atur dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sejauh ini dampak kebijakan publik dalam hal menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Alasa yaitu, meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin, yang dimana dengan adanya kebijakan yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan langsung, meningkatnya juga akses pembelajaran dan kesehatan, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lowongan kerja bagi masyarakat.

Kendala Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa

Kebijakan publik mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga dapat membantu mengurangi kemiskinan. Kebijakan publik bertujuan untuk mengurangi populasi dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, merubah tingkah laku masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling miskin. Program ini bertujuan dalam waktu yang relatif cepat untuk meminimalisir beban, tetapi dalam selang waktu yang lama, diharapkan dapat menghentikan roda keluar dari perangkap kemiskinan di Kecamatan Alasa.

Kendala yang dihadapi pada kebijakan publik dalam program penanggulangan kemiskinan di kecamatan alasa yaitu : (1) Kurangnya data dan informasi yang lengkap tentang kondisi kemiskinan, sehingga sulit untuk merancang dan menerapkan program yang efektif dan tepat sasaran; (2) Anggaran yang tidak memadai sehingga dapat menghambat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh; (3) Kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap sanksi pelanggaran kewajiban; (4) Hubungan antar anggota yang kurang baik; dan (5) Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Upaya Mengatasi Kendala Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Alasa

Beberapa undang-undang, seperti UU No 23 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan publik secara hukum. Dengan bantuan kebijakan publik, mereka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan publik merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menumbuhkan taraf hidup masyarakat. Di sisi lain, kebijakan publik yang bernuansa pemberdayaan membantu rumah tangga miskin untuk keluar dari kemiskinan melalui program yang disediakan pemerintah.

Beranjak dari hal tersebut, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kebijakan publik pada program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Alasa adalah Hubungan antar anggota harus baik supaya kebijakan publik yang diberikan berjalan dengan lancar dan terhindar dari hambatan. Serta memperbaiki koordinasi antar lembaga dan instansi dengan membentuk forum atau tim koordinasi khusus yang melibatkan semua pihak terkait, selalu mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat dan terkini untuk

memfasilitasi perencanaan dan evaluasi program yang lebih efektif, meningkatkan sarana dan prasarana mengenai kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat, harus ada pemahaman masyarakat miskin terhadap sanksi pelanggaran kewajiban.

SIMPULAN

Dampak yang terjadi yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan langsung, meningkatnya stabilitas pembelajaran dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kendala yang dihadapi yaitu : keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada sehingga dapat menyulitkan dan menghambat pelaksanaan program, keterbatasan infrastruktur/logistik belum memadai di daerah yang susah dijangkau sehingga akses terbatas terhadap bantuan yang disediakan pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu pemerintah menganalisis data yang akurat dan terkini untuk memfasilitasi perencanaan dan evaluasi program yang lebih efektif, memberikan pemahaman masyarakat miskin terhadap sanksi pelanggaran kewajiban, memperbaiki sarana dan prasarana serta anggaran dan hubungan antar anggota harus baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. (2017). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons,.
- Dye, Thomas R. (2017). *Understanding public policy (15th Ed.)*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryawati 2015. Laporan Evaluasi Implementasi Kebijakan Obat Nasional Indonesia Tahun 2014. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi Vol.7 No.2*.
- Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Infrastruktur
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Dan Penyuluhan Kesehatan
- Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Kemiskinan
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Jalan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.